Vol. 28 No. 3, Desember 2023, 257—269 copyright @ 2023 Jurnal Perempuan | DOI: 10.34309/jp.v28i3.877

DDC: 305

Menyokong Tenaga Kerja: Fenomena *Waithood* dan Kerja Perawatan Tak Berupah dalam Perspektif Reproduksi Sosial

Supporting the Labor: The Phenomenon of Waithood and Unpaid Care Workforce in the Perspective of Social Reproduction

Alfiatul Khairiyah¹ & Muhammad Aminullah Thohir²

Departemen Sosiologi, FISIPOL, Universitas Gadjah Mada^{1&2} Jalan Sosio Yustitia Nomor 1, Karang Malang, Catur Tunggal, Sleman, DI Yogyakarta ^{1&2}

alfiatulkhairiyah 1097@mail.ugm.ac.id¹ & muhammadaminullahthohir@mail.ugm.ac.id²

Kronologi Naskah: diterima 31 October 2023, direvisi 23 November 2023, diputuskan diterima 24 Desember 2023

Abstract

The construction of unpaid care work as the responsibility of women has contributed to the emergence of the postponing marriage phenomenon (waithood) among youth, especially women. On the other hand, care work is an integral part of the reproductive workforce, related to productive work. Furthermore, care work also contributes to reproducing the workforce in serving the interests of capital accumulation. The mechanization of women's roles in creating a workforce surplus makes women work excessively and hinders economic access. It argues that the financial pressures and the burden of work indirectly lead to the delayed marriage phenomenon. This financial pressure and the burden of care work indirectly contribute to the postponement of marriage. This study adopts a perspective of Social Reproduction Theory by utilizing qualitative research methods and a literature study approach. This study analyzes the relationship between capitalism, care work, and the recent phenomenon of waithood. The results indicate that women have been supporting the workforce through their care work, and this occurs systemically as a consequence of the capitalist system, which has led to the postponement of women's marriages.

Keywords: care work, capitalism, social reproduction, waithood

Abstrak

Kerja perawatan tak berupah yang dikonstruksi menjadi tanggung jawab perempuan telah berkontribusi pada berkembangnya fenomena penundaan pernikahan (waithood) di kalangan pemuda khususnya perempuan. Di sisi lain, kerja-kerja perawatan merupakan kerja reproduksi yang terintegrasi dengan kerja produksi. Care work juga berkontribusi dalam mereproduksi tenaga kerja demi kepentingan akumulasi modal. Mekanisasi perempuan dalam menciptakan tenaga kerja membuat kerja perempuan berlebih dan menghambat akses ekonomi. Akibatnya, himpitan ekonomi dan beban kerja secara tidak langsung menciptakan fenomena penundaan pernikahan. Kajian ini menggunakan perspektif Social Reproduction Theory dengan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi pustaka. Kajian ini menganalisis hubungan antara kapitalisme, kerja perawatan, dan fenomena waithood yang terjadi belakangan ini. Hasil analisis ditemukan perempuan telah menyokong tenaga kerja melalui kerja-kerja perawatan. Hal ini terjadi secara sistemik akibat sistem kapitalisme dan berdampak pada penundaan pernikahan perempuan.

Kata kunci: kerja perawatan, kapitalisme, reproduksi sosial, waithood

Pendahuluan

Kerja-kerja perawatan tak berupah telah menciptakan ketersediaan tenaga kerja dan secara tidak langsung menyebabkan fenomena penundaan pernikahan di kalangan pemuda. Pernikahan selama ini sering kali diasosiasikan dengan terhambatnya proses aktualisasi pemuda dalam karier dan ekonomi. Aktualisasi diri identik dengan kemerdekaan seseorang yang lepas dari ikatan pernikahan. Diakui atau tidak kerja-kerja perawatan tak berupah dalam keluarga merupakan salah satu penghambatnya. Namun, yang dilupakan dalam kerja-kerja perawatan keluarga tersebut adalah

proses produksi di baliknya. Kerja-kerja perawatan selalu menciptakan ketersediaan tenaga kerja secara tak terlihat dan di sisi lain kerja perawatan tak berupah telah menimbulkan ketakutan untuk menikah.

Fenomena pemuda menunda untuk menikah (waithood) banyak terjadi di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Semenjak akhir 2022, pemuda memiliki kecenderungan untuk tidak segera menikah. Hal ini dapat dilihat dari data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2022 yang menunjukkan tren peningkatan persentase pemuda dengan status belum kawin. Angka pernikahan dalam 10 tahun terakhir menurun dari 1,79 juta

pernikahan menjadi 1,7 juta pernikahan pada tahun 2022. Menunda pernikahan ini tidak hanya di Indonesia. *Pew Research Center* mengatakan bahwa di Amerika, orang yang hidup tanpa pasangan semakin meningkat. Sekitar 61 persen orang Amerika yang berumur di bawah 35 tahun belum memiliki pasangan (Inhorn & Smith-Hefner 2021).

Waithood berdampak terhadap perubahan kependudukan dan sosial ekonomi sebab menunda pernikahan berpengaruh terhadap angka kelahiran. Waithood telah mengubah demografi dan membuat angka kelahiran semakin menurun. Total Fertility Rates (TRFs) telah menurun di banyak negara sejak tahun 1980, termasuk pada negara muslim dunia (Inhorn & Smith-Hefner 2021). Menurunnya angka kelahiran tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan penduduk dan ketersediaan tenaga kerja di suatu negara.

Fenomena waithood terjadi berkaitan erat dengan sistem ekonomi dan politik yang memaksa pemuda untuk menunda pernikahan. Fenomena-fenomena ekonomi seperti kemandirian finansial pribadi membuat pemuda memilih untuk meningkatkan karier terlebih dahulu dibandingkan menikah. Dalam hal lain, ekonomi keluarga juga dapat menjadi salah satu alasan seseorang menunda pernikahan. Himpitan ekonomi keluarga seperti orang tua, membuat pemuda memilih menunda pernikahan agar mengurangi beban sandwich generation. Sandwich Generartion sendiri merujuk kepada individu yang memiliki beban untuk merawat anak mereka yang kecil maupun sudah dewasa, serta mengurus orang tua mereka yang sudah lanjut usia (Chisholm 1999) sehingga pemuda sekarang menjalani waithood untuk mengurangi beban mereka di masa mendatang.

Himpitan ekonomi keluarga berjalan bersamaan dengan tanggung jawab perawatan anak muda terhadap orang tuanya. Dalam kerja-kerja perawatan ini, perempuan sering kali terlibat dalam pengasuhan jangka panjang sebagai pemberi perawatan baik dalam sistem formal maupun informal yang berasaskan kekerabatan ataupun teman (Polivka 2017). Sementara, kerja-kerja perawatan berbasis keluarga masih banyak terjadi di Indonesia. Didukung oleh minimnya jaminan sosial dan infrastruktur yang tidak memadai dalam hal fasilitas kesehatan dan pengasuhan serta lainnya, membuat pemuda khususnya perempuan tidak dapat terhindar dari kerja-kerja perawatan rumah tangga.

Di sisi lain, prioritas seseorang dalam memilih untuk berkarier dan memperbaiki ekonomi terlebih dahulu juga dihimpit oleh ketidakpastian ekonomi hari ini. Ketidakpastian ekonomi yang semakin meningkat banyak dirasakan oleh pemuda khususnya di perkotaan (Thieme 2018) yang menyebabkan mereka memilih untuk menunda pernikahan. Di tengah himpitan ekonomi, pemuda khususnya perempuan yang dibebankan kerja-kerja perawatan tak berupah semakin sulit mengakses kerja-kerja berupahnya. Banyak perempuan yang harus menarik diri dari kerja berupah karena harus merawat anggota keluarga (Elson 2017).

Terpinggirkannya perempuan dalam kerja-kerja berupah karena kerja-kerja perawatan tak berupah ini secara tidak langsung telah membuka jalan bagi kesenjangan pendapatan, pekerjaan, dan mobilitas seseorang untuk berkembang (Lightman & Kevins 2021). Kesenjangan dalam ekonomi baik pendapatan, pekerjaan, dan mobilitas tadi kemudian berpotensi menjadikan seseorang khususnya perempuan untuk menunda pernikahan. Hal ini juga dikuatkan oleh beban kerja perawatan.

Kerja-kerja perawatan yang dibebankan kepada perempuan sangat erat kaitannya dengan proses reproduksi sosial. Perempuan dengan himpitan ekonomi, tanggung jawab perawatan, dan pengasuhan secara tidak langsung telah menyumbang tenaga kerja baik formal maupun informal, baik itu menyumbang secara langsung menjadi tenaga kerja ataupun melalui kerja-kerja tak berupah yang telah berkontribusi memproduksi tenaga kerja. Jadi, kerja perawatan telah memberikan subsidi pada produksi komoditas dan produksi tenaga kerja (Bhattacharya et al. 2017). Hal ini membuat pemuda khususnya perempuan rela menunda pernikahan untuk menunaikan beban kerja perawatan dan membantu ekonomi keluarga.

Dilihat dari perspektif teori reproduksi sosial maka kerja-kerja tak berupah yang selama ini dilakukan perempuan telah membantu berjalannya proses sistem kapitalisme. Mulai dari perempuan merawat orang tua agar memiliki kesehatan baik dan dapat bekerja dengan baik, merawat anak agar dapat sekolah dan menjadi angkatan kerja yang baik, termasuk ketika perempuan menjadi tenaga kerja itu sendiri. Tantangan berlipat dan beban kerja perawatan dalam keluarga mendorong perempuan memutuskan untuk menunda pernikahan. Tanggung jawab dalam keluarga yang tak dapat diduga sering kali menghambat kemajuan pendidikan dan prospek pekerjaan. Hal ini dapat menunda transisi pemuda yang diharapkan secara sosial (Day & Evans 2015) termasuk pernikahan. Bagaimanapun, pemuda memiliki keinginan untuk menyelesaikan pendidikan, mendapatkan pekerjaan layak, pasangan, dan berkembang. Namun, tanggung jawab dan aspirasi pengasuhan dan perawatan terhadap keluarga membuat pemuda memilih menunda untuk menikah sebagai tanda transisinya menuju dewasa secara sosial.

Fenomena menunda pernikahan pada akhirnya adalah fenomena yang juga dibentuk oleh sistem kapitalisme. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan utama yaitu bagaimana sistem kapitalisme diam-diam memanfaatkan secara kerja-kerja perawatan hingga berdampak kepada fenomena penundaan pernikahan. Fenomena ini akan dibahas menggunakan perspektif teori reproduksi sosial untuk melihat sejauh mana kerja perawatan mendukung sistem kapitalisme dan menimbulkan beban serta ketakutan anak muda khususnya perempuan untuk melangsungkan pernikahan.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan pada kajian ini adalah studi pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Metode ini digunakan sebagai langkah analisis kritis terkait fenomena waithood dan kaitannya dengan kerja-kerja perawatan dan sistem kapitalisme. Dengan menggunakan perspektif Social Reproduction Theory (SRT), penulis akan mengkritisi fenomena tersebut melalui pembacaan-pembacaan berbagai literatur yang tersedia seperti jurnal, hasil penelitian, berita, dan dokumen lainnya yang mendukung. Jadi, pertama, penulis melakukan kajian tentang SRT sebagai pisau analisis untuk melihat kerja-kerja perawatan perempuan baik faktor yang mendorong dan siapa yang mendapatkan manfaat dari kerja-kerja tersebut serta dampaknya pada penundaan pernikahan khususnya pada perempuan. Hasil penelitian berupa narasi kritis pada sistem kapitalisme yang telah membentuk tenaga kerja alami dalam rumah tangga berupa perempuan yang berangkat dari ketidakadilan gender dalam ketenagakerjaan itu sendiri (Ferguson 2020) serta narasi kritis pada kerja-kerja perawatan tak berupah (unpaid care work) dan hubungannya dengan pembentukan fenomena waithood. Kami juga menggunakan konsep 5R, yaitu recognition, reduction, redistribution, reward, & representation (ILO 2019) yang dijabarkan oleh ILO untuk menjawab permasalah waithood yang juga berkaitan dengan kerja keperawatan tak berupah yang dilakukan oleh perempuan.

Memahami Kerja Perawatan dan Reproduksi Sosial

Kerja-kerja keperawatanan tak berupah mayoritas dilakukan oleh perempuan. Kerja perawatan yang tidak berupah ini dibebankan kepada istri untuk melakukan perawatan kepada keluarganya baik suami ataupun anak sebagai tenaga kerja atau calon tenaga kerja. Perempuan telah menghabiskan banyak waktunya untuk melakukan perawatan, pengasuhan, memasak, membersihkan rumah, dan bertanggung jawab terhadap anak dan orang tua lebih banyak daripada yang dilakukan laki-laki. Beberapa hal tersebut disebut dengan kerja keperawatan yang tidak berupah (unpaid care work).

Dalam masyarakat kapitalis, kerja keperawatan tidak berupah yang dibebankan kepada perempuan merupakan bentuk dehumanisasi perempuan dan tidak membebaskan perempuan (Ferguson 2020). Menurut Ferguson, perempuan memiliki tanggung jawab untuk memproduksi tenaga kerja yang sangat membantu kapitalis. Perempuan digunakan oleh kapitalis untuk merawat dan memproduksi tenaga kerja tanpa mendapatkan upah. Hal tersebut karena masih ada konstruksi pikiran patriarki yang beranggapan bahwa perempuan berada di bawah laki-laki dan akhirnya bergantung terhadap kerja berupah yang dilakukan oleh laki-laki. Akhirnya, perempuan menjadi tenaga kerja keperawatan untuk laki-laki merupakan sebab dari sistem kapitalisme dan patriarki.

Adapun kerja perawatan merupakan kerja yang berkontribusi terhadap kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional orang lain (Duffy et al. 2013) baik itu kerja perawatan tak berupah dan yang berupah. Kerja perawatan berupah seperti Pekerja Rumah Tangga (PRT) dan yang tak berupah seperti kerja perawatan yang dilakukan dengan suka rela oleh ibu rumah tangga. Namun, Federici menjelaskan bahwa PRT yang diupah pun juga tetap menjadi tanggung jawab majikan yang mempekerjakan PRT, bukan dari kapitalis ataupun negara. Artinya, perempuan masih bertanggung jawab atas kerja perawatan, baik berupah ataupun tidak berupah (Federici 2020).

Kerja perawatan berupah maupun tidak telah mengalami genderisasi dan membebankan perempuan. Kerja-kerja keperawatan telah memengaruhi bagaimana aktivitas kerja antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti kesenjangan dalam kerja produksi berupah yang masih didominasi laki-laki, membuat mayoritas perempuan beraktivitas dalam

kerja perawatan tak berupah dalam rumah tangga. Kesenjangan yang dimaksud seperti perbedaan akses terhadap tenaga kerja atau peluang laki-laki dan perempuan dalam sektor kerja produksi berupah yang secara tersistem telah menempatkan lakilaki dan perempuan "dalam ruang yang berbeda". Sistem pasar tenaga kerja yang masih bias gender telah memosisikan perempuan pada kerja-kerja keperawatan khususnya tak berupah yang kemudian menjadi agen reproduksi sosial bagi terbentuknya tenaga kerja baru. Hal ini menyulitkan perempuan untuk berpartisipasi dalam angkatan kerja Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan survei Badan Pusat Statistik tahun 2023 yang menjelaskan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 54,42 persen, sedangkan laki-laki 83,98 persen. Penelitian Utomo (2018) juga menunjukkan bahwa partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami stagnasi hanya 51 persen saja. Dapat disimpulkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan tidak berkembang secara signifikan sejak tahun 1990-an hingga 2023.

Jika sistem ekonomi yang bias gender selalu menghambat perempuan pada sektor kerja berupah dan menempatkan perempuan pada kerja keperawatan tidak berupah, maka kerja perempuan dalam keperawatan tak berupah juga mampu merawat sistem ekonomi yang dikendalikan oleh kapitalisme. Kerja keperawatan tidak berupah menjadikan perempuan sebagai mesin reproduksi bagi berjalannya dan perputaran produksi komoditas dan tenaga kerja. Aktivitas-aktivitas keseharian perempuan, seperti mengasuh anak, orang tua, dan anggota keluarga sebetulnya adalah upaya untuk merawat calon/tenaga kerja berupah. Artinya, kerja keperawatan perempuan sebenarnya kerja reproduksi dalam proses kerja produksi kapitalis.

Dalam kerja upahan pun, perempuan juga sering kali ditempatkan pada kerja-kerja keperawatan yang mencakup pengasuhan; menjadi pekerja rumah tangga; perawat; dan lainnya. Dengan begitu, terjadi feminisasi kerja perawatan yang semakin memiskinkan perempuan dan tidak membebaskan perempuan dalam dunia kerja, baik itu dalam kerja perawatan berupah dan tidak berupah. Hal ini karena kerja perawatan yang berupah pun sering kali tidak mendapatkan haknya seperti hak cuti bahkan upah sering kali di bawah UMR. Paparan Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga (Jala PRT) juga menyebutkan upah rata--rata PRT di DKI Jakarta hanya Rp 1.200.000—Rp 1.500.00 sementara Semarang,

Yogyakarta, Makassar, Surabaya, dan Medan hanya Rp 800.000—Rp 1.000.000 (Sinambela 2023). Kerja perawatan yang tidak berupah pun, menurut Federici juga rawan mengalami kekerasan (Federici 2020) baik itu kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan sosial. Jika dilihat secara saksama, posisi kerentanannya bisa dua kali lipat karena ketiadaan upah dan perlindungan. Apalagi, kerja perawatan yang mayoritas dikerjakan oleh perempuan ini belum mendapatkan pengakuan sebagai kerja dan tidak memiliki regulasi upah yang jelas. Kerja keperawatan menjadi kerja informal bahkan tak diakui yang membuat kondisi perempuan semakin rentan.

Hal yang perlu digarisbawahi dalam kerja-kerja perawatan tak berupah adalah pemeliharaan tenaga kerja atau calon tenaga kerja. Kerja perawatan berkontribusi dalam membangun dan memelihara tenaga kerja yang tidak dapat disubsidi oleh pasar (Duffy et al. 2013). Dalam hal ini, kerja perawatan tak berupah memiliki keterkaitan dengan pasar karena memengaruhi terbentuknya tenaga kerja yang berkualitas. Tenaga kerja berkualitas adalah elemen penting dalam produksi komoditas sehingga tersedianya tenaga kerja yang baik dan generasi berkualitas untuk tenaga kerja menguntungkan pihak lain yaitu pasar. Tenaga kerja sebagai aspek penting dalam proses akumulasi kapital.

Konstruksi sosial yang terjadi pada perempuan dan laki-laki dalam pembagian kerja menjadi bagian penting dalam kajian ini. Konstruksi gender atas tenaga kerja juga menyebabkan perempuan tidak terserap pada kerja-kerja produksi dan berupah dan menjadi pekerja perawatan tak berupah. Hal ini berkaitan dengan pendekatan yang peneliti pakai yakni social reproduction theory (SRT) yang mempertanyakan bagaimana kontribusi kerja perawatan dalam memelihara/mereproduksi tenaga kerja? Siapa yang menerima manfaat besar dari kerja-kerja perawatan? Bagaimana kerja perawatan telah memproduksi tenaga kerja dan memastikan seorang anak dapat menjadi tenaga kerja dan generasi kerja yang baik? Yang secara tidak terlihat telah menyokong proses kerja produksi kapitalisme. Dalam tradisi Marxian, teori reproduksi sosial juga mempertanyakan nilai lebih yang diberikan kelompok tertentu dalam sistem reproduksi ini (Larastiti 2020). Lalu, siapa dan kerjakerja apa yang selama ini telah memberikan nilai lebih tersebut?

Perempuan sebagai pelaku kerja keperawatan tak berupah telah dimaknai sebagai subjek yang

membantu memulihkan apa yang habis selama proses produksi dalam melangsungkan kehidupan (Larastiti 2020). Dalam hal ini, reproduksi sosial menggunakan organisasi keluarga sebagai basis analisis dalam melihat bagaimana opresi yang terjadi pada perempuan. Perempuan dalam keluarga setiap hari harus berusaha untuk menjamin pangan yang baik untuk keluarga, menjamin kesehatan keluarga dengan menyediakan air bersih dan kelengkapan lainnya untuk menjaga kesehatan. Bahkan, perempuan dapat bekerja lebih keras untuk memastikan keluarganya mendapat asupan makan yang baik. Apalagi, bagi perempuanperempuan di pedesaan yang menggantungkan hidup pada sumber daya alam di tengah krisis iklim yang melanda. Upaya-upaya perawatan akan semakin sulit dan membutuhkan upaya lebih besar dari sebelumnya. Hal-hal tersebut merupakan reproduksi sosial yang memiliki arti menciptakan, memelihara, hingga merestorasi tenaga kerja untuk kepentingan kapitalis (Bhattacharya et al. 2017). Kerja perawatan yang memiliki arti merawat tenaga kerja merupakan kerja reproduksi dalam tahapan memelihara agar sistem ketenagakerjaan berjalan dengan baik berikut dengan ketersediaannya. Kerja yang memastikan tenaga kerja dalam kondisi sebaik mungkin untuk bekerja di hari esok sebagai tenaga kerja upahan.

Perempuan mengalami kesulitan untuk mengakses kerja produksi karena segregasi gender. Akhirnya, perempuan bekerja sebagai pekerja keperawatan tanpa upah yang memastikan anggota keluarganya dapat bekerja dengan baik, apakah itu di sektor perkebunan, pabrik, dan perkantoran, atau kerja lainnya. Reproduksi sosial mengurai bagaimana opresi perempuan yang menguat dalam ranah keluarga menuju sistem produksi kapitalisme (Ferguson 2020). Teori ini melihat relasi kerja produksi dan reproduksi dalam proses produksi kapitalisme yang merenggut kerja-kerja perempuan. Perempuan melakukan kerja perawatan tak berupah untuk kepentingan kapitalisme dengan merawat tenaga kerja milik kapitalis. Opresi terhadap perempuan ini terus dipertahankan seiring dengan dinamika dalam hubungan reproduksi sosial dan proses akumulasi kapital.

Reproduksi sosial sangat berkaitan dengan kapitalisme. Kerja reproduksi sosial ialah cara menciptakan tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri merupakan tenaga produksi untuk memproduksi komoditas kapital. Adapun kerja perawatan merupakan salah satu hal dari reproduksi sosial yang akan memelihara tenaga kerja, seperti menyiapkan makanan,

mencuci baju untuk tenaga kerja milik kapitalis. Tugastugas dasar inilah yang mendukung berlangsungnya para tenaga kerja agar bisa tetap bekerja di kemudian hari. Namun, pada saat yang sama, reproduksi sosial ini telah menyediakan pasokan tenaga kerja untuk mendukung proses akumulasi kapital (Ferguson 2020), dengan tugas-tugas dasar yang dilakukan dan strategi dalam mempertahankan kehidupan anggota keluarga.

Maka, pertanyaan di atas terkait siapa yang mendapatkan manfaat dari kerja keperawatan tak berupah? Bagaimana tenaga kerja itu diproduksi? Jawabannya ada dalam teori reproduksi sosial. SRT percaya bahwa produksi barang dan jasa serta produksi kehidupan merupakan sesuatu yang terintegrasi satu sama lain (Bhattacharya et al. 2017). Ketiganya berjalan dalam sistem kapitalisme patriarkis. Kapitalisme memanfaatkan sistem sosial patriarki dengan menindas perempuan agar mendapatkan keuntungan lebih dari penindasan perempuan tersebut. Sistem kapitalisme patriarki pelan-pelan mengopresi perempuan melalui kerja perawatan tak berupahnya. Hal ini adalah kegiatan sehari-hari perempuan yang tidak banyak disadari telah berkontribusi secara signifikan pada produksi barang dan jasa. Perempuan telah melakukan pekerjaan yang tak terlihat dan dianggap remeh di sela-sela kesibukan mereka (Fernandes et al. 2023).

Eksploitasi pada perempuan oleh kapitalisme dilakukan melalui kerja perawatan. Kerja keperawatan sebagai salah satu reproduksi sosial yang sarat akan opresi perempuan dapat dilihat dari dampaknya terhadap kerentanan perempuan. Dalam kerja perawatan tak berupah seperti ibu rumah tangga, opresi dapat dilihat dari beban ganda atau kerja berlebih (over burden/over work) yang dilakukan oleh perempuan dengan tanpa upah. Pada corak produksi kapitalis, eksploitasi perempuan dalam kerja perawatan tak berupah ini sangat menguntungkan. Kapitalisme bisa memanfaatkan perempuan untuk menciptakan dan memelihara tenaga kerja tanpa perlu memberikan upah kepada para perempuan secara langsung. Maka dari itu, kerja keperawatan tidak berupah sangat menguntungkan kapitalisme.

Beban Kerja dan Kerentanan Perempuan dalam Kerja Keperawatan

Kesenjangan gender dalam kerja reproduksi menyebabkan perempuan memiliki beban kerja berlebih bahkan juga beban ganda. Dalam sistem patriarki, kerja produksi lebih didominasi oleh laki-laki, sedangkan perempuan sering kali tidak terlibat. Beban kerja perempuan ada pada kerja-kerja perawatan, domestik, pengasuhan, dan lainnya yang berhubungan dengan kerja rumah tangga. Namun, perempuan juga mulai terlibat dalam kerja produksi untuk memenuhi kebutuhan keluarga yang tidak cukup apabila hanya mengandalkan upah dari suaminya. Selama ini, perempuan dikenal memiliki tiga beban (triple burden) di antaranya beban produksi, beban reproduksi, dan beban sosial. Beban produksi pada perempuan terjadi karena perempuan turut memiliki peran dalam pemenuhan ekonomi keluarga. Tidak jarang perempuan melakukan kerja berupah dan bekerja di sektor formal maupun informal untuk menyokong penghidupan. Namun, selama ini perempuan mayoritas bekerja di sektor ekonomi informal dengan waktu yang lebih fleksibel agar dapat melakukan kerja reproduksinya dengan baik.

Beban reproduksi merupakan kerja pengasuhan dan perawatan serta domestik yang diserahkan kepada perempuan dalam rumah tangga. Status pernikahan perempuan selalu diasosiasikan dengan peran antara pengasuhan dan bekerja (Zilanawala 2016). Kerja-kerja perawatan dan domestik seperti sudah tidak dapat dipisahkan dari kerja perempuan. Tanggung jawab untuk ketahanan pangan keluarga, ketersediaan air bersih, kesehatan keluarga, dan fasilitas lainnya untuk memenuhi kebutuhan keluarga diberikan kepada perempuan. Selain itu, tanggung jawab perempuan tidak hanya pada suami dan anaknya saja, tetapi juga mengasuh orang tua atau orang lanjut usia dalam keluarga.

Layanan kesehatan keluarga sering kali bergantung kepada kerja perawatan tak berupah yang dilakukan perempuan - dianggap dapat memperkuat kekeluargaan dan rasa keibuan. Hal ini mengasumsikan bahwa perempuan atau ibulah yang paling bertanggung jawab dalam merawat baik untuk keluarga dan masyarakat (Jakimow et al. 2019). Oleh karena itu, kerja perawatan tak berupah perempuan terkadang menghambat kerja-kerja berupah perempuan hingga mengeksklusi perempuan dari pasar tenaga kerja. Perempuan adalah sumber daya manusia primer dalam sebuah keluarga dan keluarga merupakan unit primer bagi reproduksi sosial. Kontribusi perempuan di bidang non-ekonomi dalam keluarga lebih besar dibandingkan suaminya karena peran-peran domestik sesuai konstruksi gender, seperti mengurus suami, anak, mengatur rumah tangga, baik sebelum dan setelah bekerja (Tjandraningsih 2018).

Dalam kerja reproduksi, perempuan memiliki banyak

waktu untuk bekerja namun perolehan pendapatan perempuan lebih kecil daripada laki-laki. Penggunaan waktu perempuan bergantung pada norma sosial yang membentuk keluarga dan memengaruhi keseimbangan kerja perawatan dalam rumah tangga (Charmes 2022). Waktu perempuan untuk bekerja, belajar, waktu istirahat, merawat diri sendiri sebagai kebutuhan dan waktu luang semuanya merupakan bentuk konstruksi dan mendorong perempuan untuk lebih berkomitmen pada kerja tak berupah dan kerja perawatan.

Komitmen tinggi perempuan dalam melakukan kerja reproduksi telah menentukan kesejahteraan yang lain. Melalui kerja perawatannya, perempuan memberikan nilai lebih yang tersembunyi pada kerja-kerja berupah. Perempuan menopang seluruh kebutuhan rumah tangga demi kerja berupah atas kontrol kapitalisme (Felt & Sinclair 1992). Hanya saja, kerja-kerja perawatan ini belum menjadi kerja yang diakui. Padahal, kerja perawatan juga memiliki kerentanan kerja yang sama seperti kerja berupah lainnya. Kerentanan pekerja perawatan dapat terjadi pada aspek fisik, psikis, dan ekonomi, bahkan seksual. Kerentanan semakin diperparah dengan tidak adanya regulasi yang jelas terkait perlindungan pada pekerja perawatan (care workers), seperti jaminan sosial, regulasi upah, jaminan kesehatan, dan lainnya. Akhirnya, pekerjaan reproduktif juga pekerjaan inheren perempuan yang menguntungkan dunia patriarki (Irawaty 2017).

Pembagian kerja tak seimbang dalam keluarga menyebabkan perempuan menanggung pekerjaan domestik dan perawatan. Domestikasi perempuan menunjukkan bahwa upaya subordinasi telah dimulai sejak dalam institusi keluarga. Perempuan menjadi identik dengan kepedulian, perawatan, pengasuhan, dan kekeluargaan. Sementara, beban perempuan di lingkungan sosial terletak pada keterlibatan dalam perempuan kegiatan-kegiatan organik masyarakat, seperti arisan, ritual budaya dan agama, serta lainnya yang juga sering kali dibebankan kepada perempuan seperti menyiapkan makanan dalam satu hari penuh yang menghabiskan waktu. Khususnya perempuan yang hidup di pedesaan dengan solidaritas masyarakat yang tinggi. Ketiga beban kerja perempuan berjalan dalam waktu yang sama. Karenanya, perempuan memiliki beban kerja berlebih dalam berbagai ruang kerjanya khususnya pada beban perawatan dan pengasuhan. Kerja berlebih ini juga menghambat perempuan mengakses sumber daya ekonomi dan peluang kerja berupah.

Dalam perspektif SRT, pekerja perawatan disebut

sebagai the shadow of slavery. Perbudakan ini menyebabkan kerja berlebih bahkan ganda terhadap perempuan yang menjauhkan perempuan dari kesejahteraan. Hal ini juga membuat perempuan dalam menghabiskan waktunya hanya untuk bekerja, baik untuk keluarga, sosial, produksi, dan reproduksi, dan tidak memiliki waktu luang untuk meningkatkan pengetahuannya, seperti belajar ataupun diskusi. Berbeda dengan laki-laki yang masih memiliki waktu luang untuk belajar dan berdiskusi dengan kelompoknya. Perempuan memiliki waktu bekerja yang relatif lebih lama daripada laki-laki namun memiliki kesejahteraan yang relatif lebih rendah dari laki-laki.

Perempuan dalam Jerat Kapitalisme

Perempuan mengalami ketertindasan sejak era perbudakan hingga kapitalisme. Dari era perbudakan hingga kapitalisme membuat individu memegang kendali atas kehidupan orang lain karena kepemilikan sumber daya atau modal. Engels menjelaskan penindasan perempuan juga sejalan dengan konsep hak milik pribadi dan keluarga dalam sejarah perkembangan corak produksi masyarakat (Engels & Untermann 2021). Corak produksi dengan adanya akumulasi modal membuat keluarga harus menurunkan kekayaannya atau modal ke anak lakilaki yang nantinya akan membuat keluarga baru. Perempuan nantinya akan menjadi bagian keluarga yang dipimpin oleh suami atau bapaknya. Inilah yang membuat perempuan menjadi properti (hak milik pribadi) suaminya atau bapaknya sebagai upaya proses reproduksi sosial. Engels menjelaskan bahwa perempuan mengalami ketertindasan dalam proses akumulasi kapital karena perempuan menjadi hak milik. Akibatnya, perempuan tidak memiliki kesempatan yang setara dalam pembagian kerja. Di era perbudakan, perempuan dijadikan hak milik keluarga sebagai budak tenaga kerja pertanian dan pemuas nafsu. Di era kapitalisme, perempuan dijadikan hak milik kelas borjuasi sebagai tenaga kerja dan reproduksi tenaga kerja.

Patriarki juga dimanfaatkan oleh sistem kapitalisme untuk menekan biaya produksi agar mendapatkan keuntungan yang lebih (Ferguson 2020). Kapitalisme dan patriarki menjadi dua elemen yang berkelindan satu sama lain. Hal ini juga dibedakan dari upah perempuan lebih rendah, jenis kerja, dan kesempatan kerja. Nilai kerja perempuan dikurangi atau direduksi karena faktor biologisnya, seperti menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui (Rahayu 2017). Seperti dalam

praktiknya, cuti untuk menstruasi, hamil, melahirkan, dan menyusui dipersulit oleh pemilik pabrik. Ketika perempuan sedang menstruasi, sering kali harus tetap bekerja karena sulitnya mendapatkan cuti. Apabila tidak sanggup bekerja, maka akan memilih bolos kerja dengan potongan upah. Cuti hamil pun diberikan hanya satu bulan (Mailoa 2022). Akibatnya, sering kali pekerja perempuan ketika memiliki kandungan atau sedang hamil mengundurkan diri tanpa mendapatkan pesangon atau bahkan mengalami keguguran ketika sedang bekerja.

Sistem kapitalisme enggan memberikan upah kepada pekerja perempuan yang cuti karena tidak melakukan kerja produksi yang menguntungkan mereka. Ketika tidak melakukan pekerjaan produksi komoditas pabrik karena cuti, maka tidak akan dianggap oleh sistem kapitalisme dan tidak diberikan upah. Akibatnya, pekerjaan keperawatan ketika pekerja perempuan melahirkan dan menyusui menjadi tanggung jawab perempuan itu sendiri tanpa adanya keterlibatan pemilik pabrik. Adapun pilihan lain ketika keluar dari pabrik adalah menjadi pekerja rumahan (home based worker) yang bekerja untuk pabrik dan melakukan kegiatan produksi dari rumah agar tidak meninggalkan kerja keperawatan dan pengasuhan. Namun, pekerja rumahan tidak tercakup dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja sehingga mereka menjadi rentan tidak mendapatkan jaminan kerja layak dan aman. Kerentanan ini dipengaruhi oleh kondisi lingkungan kerja yang buruk, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang tidak memadai, serta tidak adanya perlindungan dan jaminan sosial bagi pekerja rumahan perempuan (Rifyana 2019), seperti penyimpanan alat kerja yang berbahaya seperti mudah terbakar dan beracun yang diletakan di rumah pekerja yang bisa saja dimainkan oleh anak-anak.

Pada akhirnya, kapitalisme memanfaatkan sistem patriarki untuk akumulasi kapital sebagai keuntungan mereka dengan cara tidak memberikan hak kepada pekerja perempuan dalam melakukan kerja perawatan atau *care work*. Namun di sisi lain, kerja perawatan juga dijadikan keuntungan sistem kapitalisme sebagai mesin produksi tenaga kerja. Hal ini sangat berkaitan dengan kondisi perempuan baik secara fisik, psikis, maupun sosial termasuk pada ekonomi perempuan yang semakin rentan. Perempuan menjadi subjek yang dihimpit oleh kapitalisme dari berbagai sisi. Perempuan seharusnya mendapatkan hak cuti untuk

haid dan melahirkan dengan tetap diupah baik dari pabrik langsung atau disubsidi oleh negara sehingga perempuan tetap mendapatkan penghasilan ketika melakukan kerja perawatan. Hal tersebut sebagai upaya perempuan tetap mendapatkan penghasilan ketika melakukan pekerjaan perawatan.

Kerja Keperawatan yang Tak Dianggap

Tujuan utama kapitalisme adalah akumulasi kapital. Dalam proses akumulasi kapital, kapitalisme menggunakan strategi akumulasi primitif untuk mentransformasi sistem sosial feodal ke kapitalisme. Akumulasi primitif membuat petani sebagai pemilik tanah (alat produksi di era feodalisme) dirampas oleh para kelas borjuasi (Marx 2006). Akumulasi primitif ini membuat kelas borjuasi dapat menguasai tanah (alat produksi) dan membuat petani, nelayan, masyarakat adat yang dirampas alat produksinya menjadi tenaga kerja bagi kelas borjuasi. Namun bagi Silvia Federici, akumulasi primitif juga berkaitan dengan perempuan. Perempuan dirampas kontrol tubuhnya oleh kapitalisme untuk tujuan menciptakan tenaga kerja bagi kapitalis yang pada akhirnya perempuan tidak mendapatkan kebebasan dan hidup dalam belenggu kontrol tubuh oleh kapitalisme.

Perampasan atas tubuh perempuan oleh kapitalisme menjadikan perempuan hidup dalam ketertindasan. Federici menyampaikan tiga bentuk perampasan atas tubuh perempuan (Federici 2009). Pertama, pembagian kerja berbasis gender yang meletakkan kerja dan fungsi reproduksi perempuan ke dalam reproduksi tenaga kerja. Kedua, pembentukan tatanan patriarki baru berdasarkan pada eksklusi perempuan dari kerja upahan dan subordinasi dari laki-laki. Ketiga, kontrol atas tubuh berupa mekanisasi tubuh perempuan bagi produksi tenaga kerja baru. Pembagian kerja berbasis gender ini membuat perempuan akhirnya dibatasi bekerja pada hal-hal yang berkaitan dengan reproduksi tenaga kerja saja. Sementara itu, kerja reproduksi tidak dimasukkan dalam pekerjaan yang mendapatkan upah dan tidak dianggap sebagai suatu pekerjaan. Padahal pekerjaan reproduksi menjadi hal yang penting bagi akumulasi kapital karena melahirkan tenaga-tenaga kerja baru untuk kapitalisme.

Tenaga kerja menjadi keuntungan sendiri bagi kapitalisme. Perempuan sangat berperan penting dalam menciptakan tenaga kerja sehingga pada pertengahan abad ke-16 pemerintahan di Eropa menerapkan hukuman bagi perempuan yang melakukan kontrasepsi, aborsi, dan bagi yang

mandul. Perempuan tidak diperbolehkan menahan laju pertumbuhan tenaga kerja. Populasi yang besar menjadikan sumber kekayaan sosial bagi kapitalisme. Di era kapitalisme awal, tenaga kerja sangat memengaruhi kekayaan kelas borjuasi sehingga dengan cara apa pun produksi tenaga kerja tidak boleh dihentikan. Ini juga membuktikan bahwa perempuan sangat dikontrol oleh negara dan dijadikan sebagai pelayan untuk kapitalisme dengan tujuan akumulasi kapital.

Perempuan tidak hanya dijadikan sebagai objek yang dijadikan sebagai produksi tenaga kerja, melainkan juga merawat tenaga kerja dan tidak berupah. Perempuan baik sebagai anak maupun istri dalam patriarki diharuskan melakukan pekerjaan domestik atau rumah. Perempuan melakukan pekerjaan membersihkan rumah dan menyiapkan kebutuhan ayah atau suami setelah dan sebelum bekerja di pabrik. Perempuan melakukan pelayanan kepada ayah atau suaminya, seperti membuatkannya makanan, teh atau kopi, mencuci pakaiannya, dan merawatnya apabila sakit. Secara tidak langsung, yang dilakukan perempuan adalah merawat tenaga kerja pemilik modal. Namun, perempuan tidak mendapatkan timbal balik upah apa pun dari pemilik modal, padahal mereka sudah merawat tenaga kerja mereka. Kerja-kerja perawatan tenaga kerja pun akhirnya tidak dianggap sebagai keterlibatan produksi pabrik dan tidak perlu diberikan upah dalam sistem kapitalisme.

Dalam sistem kapitalisme, hanya produksi dalam pabrik yang dianggap sebagai aktivitas menciptakan nilai guna dan nilai tukar. Komoditas pabrik yang bisa dijual memiliki nilai guna diciptakan oleh tenaga kerja yang mayoritas adalah laki-laki di era kapitalisme awal. Perempuan dipaksa berada di rumah untuk menciptakan dan merawat tenaga kerja tetapi dinilai tidak memiliki nilai dari sudut pandang ekonomi dan tidak dikategorikan sebagai kerja (Federici 2009). Hal ini membuat perempuan tidak memiliki sumber daya apa pun karena tidak pernah mendapatkan upah dari hasil kerja perawatan mereka atas tenaga kerja yang berupa keluarganya. Kondisi ini pada akhirnya membuat perempuan berada di bawah laki-laki karena perbedaan akses modal dan akibatnya patriarki tidak pernah padam.

Semakin berkembangnya kapitalisme juga membuat perempuan bisa masuk dalam ranah publik untuk melakukan pekerjaan pabrik. Catatan International Labor Organization (ILO) pada tahun 2022 menjelaskan industri garmen di Indonesia didominasi oleh perempuan (ILO 2022). Fenomena ini menunjukkan bahwa di era ini, perempuan Indonesia bisa menjadi tenaga kerja seperti lakilaki. Kendati demikian, masih dari hasil catatan ILO (2022), menjelaskan bahwa buruh perempuan juga mengalami kesenjangan upah dan ketimpangan dalam kariernya. Perempuan bekerja pun tidak sepenuhnya menunjukkan indikasi bahwa perempuan berdaya dan memiliki kebebasan. Dalam masyarakat kapitalis, didapati bahwa perempuan bekerja dikarenakan tidak mencukupinya penghasilan suami untuk kebutuhan keluarganya. Ironisnya, perempuan tidak hanya dituntut terlibat dalam kerja produksi namun tetap melakukan reproduksi dalam keluarganya termasuk kerja perawatan tak berupah.

Situasi perempuan bekerja sebagai pekerja keperawatan tidaklah tunggal. Ada juga keluarga yang memiliki penghasilan memadai memilih menyewa Pekerja Rumah Tangga (PRT) untuk melakukan kerja perawatan. Namun, ketika menyewa PRT sebuah keluarga harus memberikan upah kepadanya yang diambil dari kantong pribadi dari hasil kerja keluarga yang menyewanya. Keluarga harus mengeluarkan biaya tambahan untuk membayar PRT yang melakukan kerja perawatan untuk merawat tenaga kerja dan menopang kapitalisme. Artinya, walaupun perempuan tidak melakukan kerja perawatan untuk keluarganya dan bisa menyewa PRT, tapi tetap masih menanggung kerja perawatan itu sendiri yang diambil dari kantong pribadi untuk menyewa PRT.

Perempuan dalam Kerja Keperawatan dan Kerja Produksi

dalam Kerja perempuan merawat dan menciptakan tenaga kerja pada akhirnya adalah untuk mempersiapkan komoditas tenaga kerja bagi kapitalis. Di situasi kapitalisme patriarkis, perempuan tidak bisa dilepaskan dari kerja-kerja perawatan yang memiliki arti memproduksi dan melakukan perawatan tenaga kerja untuk kapitalisme. Ditambah perempuan bekerja juga tidak menghilangkan penindasan mereka, justru beban mereka bertambah. Perempuan melakukan kerja produksi dan kerja perawatan tak berupah untuk kepentingan kapitalisme, tetapi tidak mendapatkan timbal balik.

Kondisi perempuan yang semakin ditindas oleh kapitalisme inilah yang membuat perempuan semakin hari semakin mengalami kesulitan. Bagi perempuan, bisa saja mereka hanya melakukan kerja perawatan dan reproduksi saja. Namun, hal tersebut mengharuskan

perempuan mencari suami yang memiliki modal besar dan akhirnya tunduk kepada suaminya karena modal dipegang oleh suaminya. Hal ini juga mengkhawatirkan perempuan apabila suaminya melakukan perselingkuhan atau hal yang semenamena terhadap dirinya, tetapi tidak bisa meminta cerai atau melawan. Perselingkuhan juga terjadi ketika salah satu pihak bergantung kepada pasangannya (Munsch 2015). Apabila meminta cerai, maka akan membuat perempuan hidup tanpa modal sama sekali yang pada akhirnya juga harus melakukan kerja produksi. Dalam penelitian yang dipaparkan di The Conversation, menyebutkan juga perempuan pascabercerai memiliki kesulitan keuangan lebih tinggi dibandingkan lakilaki (Hitchings & Douglas 2023). Hal tersebut karena perempuan juga harus melakukan kerja perawatan. Hal ini lah pada akhirnya membuat perempuan menolak bergantung karena ketakutan diselingkuhi ataupun dicerai membuat mereka harus melakukan kerja produksi.

Kerja produksi juga akan menyita banyak waktu perempuan. Sejak pagi sebelum matahari terbit harus melakukan kerja perawatan seperti memasak dan mencuci. Selanjutnya, dari pagi sampai sore bahkan menjelang malam melakukan kerja produksi di bawah kelas pemilik modal. Setelah pulang pun, lanjut melakukan kerja keperawatan tak berupah dan reproduksi di waktu senggang. Hal ini membuat perempuan benar-benar hidup dalam kontrol kapitalisme. Mereka tidak bisa bebas dan setiap waktu harus bekerja untuk kepentingan kapitalisme sendiri. Kekhawatiran-kekhawatiran yang kemudian berpeluang membuat perempuan memutuskan untuk menunda pernikahan karena kerja perawatan dalam rumah tangga, beban kerja berlebih, dan himpitan ekonomi. Tidak ada distribusi peran kerja dalam keluarga antara laki-laki dan perempuan.

Perempuan mengalami ketidakadilan gender dalam kerja produksi dan kerja perawatan. Distribusi kerja perawatan lebih dibebankan kepada perempuan sehingga hal ini juga memengaruhi bagaimana perempuan sulit dalam mengakses kerja-kerja produksi —dan ini tidak sesuai dengan kerangka 5R ILO. Apabila berada dalam kerja produksi berupah, perempuan juga tetap melakukan kerja perawatan. Hal yang paling memberatkan ialah apabila kerja-kerja produksi menghabiskan waktu yang sangat lama melalui skema lembur yang tiada henti. Otomatis waktu istirahat perempuan juga akan semakin sedikit karena kerja produksi yang lama dan harus melakukan

kerja perawatan tak berupah di rumah sepulang kerja. Perempuan mengalami ketertindasan karena distribusi kerja yang tidak adil dan waktu kerja yang sangat lama. Hal tersebut tidak bisa dilepaskan dari skema kapitalisme yang bertanggung jawab karena menggunakan kerjakerja lembur kepada para buruhnya, termasuk buruh perempuan dan memanfaatkan sistem patriarki yang membuat perempuan tetap harus menanggung kerja perawatan tak berupah.

Kapitalisme Menciptakan Waithood

Perempuan muda di Indonesia terutama di perkotaan memahami masalah yang mereka alami dalam situasi kapitalisme patriarkis. Perempuan muda di perkotaan lebih memiliki akses pendidikan dibandingkan di pedesaan (Lisnasari 2023). Hal ini membuat perempuan di perkotaan dapat belajar mengenai problem yang mereka rasakan. Namun, pemahaman ini menciptakan ketakutan sekaligus upaya dari perempuan untuk tetap bertahan dalam himpitan kapitalisme yang patriarkis dengan cara menunda pernikahan. Dilansir dari Kumparan, dua psikolog Dian Wisnuwardhani dan Reynitta Poerwito menjelaskan pemuda-pemudi memiliki ketakutan atas finansial, sosial, dan konflik ketika akan menikah (Ramadhan 2023). Bagaimana perempuan sudah memiliki imajinasi terhadap situasi pernikahannya baik dalam ekonomi, tanggung jawab sosial, seperti kerja perawatan, bahkan konflik yang akan terjadi.

Perempuan juga berada dalam bayang-bayang kebutuhan hidup yang semakin tinggi. Sering kali perempuan berperan penting dalam mengelola keuangan keluarga. Kebutuhan perempuan muda saat ini pun semakin tinggi, seperti rumah, baju, makan, make up, dan lain sebagainya untuk menunjang hidupnya. Kebutuhan biaya pernikahan dan merawat anak juga sangat tinggi. Bagi perempuan, hal ini jelas akan menggambarkan ketika berkeluarga maka juga harus bekerja keras untuk mendapatkan upah yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya serta menjamin kerja perawatan dan pengasuhan untuk keluarganya.

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa perempuan menikah akan melakukan kerja keperawatan dan sering kali menyebabkan perempuan tidak bekerja. Dari survei Badan Pusat Statistik tahun 2023, menjelaskan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan hanya 54,42 persen sedangkan lakilaki 83,98 persen. Hal tersebut membuktikan bahwa masih banyak perempuan yang belum bekerja. Hal

tersebut dikarenakan kondisi patriarki yang membuat perempuan harus melakukan kerja-kerja keperawatan tak berupah. Perempuan ketika melahirkan sering kali keluar dari tempat kerja karena sulitnya cuti melahirkan. Dalam merawat anak terlebih menyusui hanya bisa dilakukan oleh perempuan. Kondisi ini akhirnya membuat laki-laki yang bekerja secara tunggal dan perempuan sangat berharap kepada upah yang didapat oleh suaminya nanti.

Perempuan yang sangat bergantung kepada upah suami sangat rawan dengan relasi kuasa oleh suaminya karena merasa suami yang menghidupi keluarga dan dapat mengontrol istrinya (Cameron 2014). Hal ini yang pada akhirnya membuat perempuan berpikir panjang untuk berkeluarga dan muncul fenomena Waithood. Mereka menunda untuk menikah dan berkeluarga karena ingin mencari kestabilan ekonomi terlebih dahulu agar tidak bergantung kepada suaminya (Wulandari 2023). Singerman, pencetus konsep waithood juga menjelaskan bahwa menunda pernikahan dan melahirkan ditunda karena faktor ekonomi dan politik seperti lapangan pekerjaan yang tidak memadai sehingga membuat kaum muda melakukan waithood (Singerman 2007). Dalam konteks perempuan, sering kali juga menunda pernikahan untuk mengejar pendidikan dan karier. Bisa disimpulkan, waithood sendiri adalah tahapan menunggu untuk berfokus kepada menunda pernikahan dan memiliki anak karena kebutuhan ekonomi yang tinggi.

Waithood mulai berkembang di Indonesia. Mahasiswa di Yogyakarta lebih memilih pendidikan dan pekerjaan dibandingkan menikah (Hasan 2019). Adapun di tahun 2017, Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat kebahagian orang yang sendiri (belum/tidak menikah) lebih tinggi dibandingkan mereka yang telah menikah, terutama kaum perempuan (Andita 2017). Apabila mengacu kepada definisi Singerman (2007), maka perempuan akan fokus kepada pendidikan dan kariernya. Dalam era kapitalisme, pendidikan dan karier menjadi hal yang penting. Meningkatkan pendidikan juga berarti meningkatkan standar hidupnya, dengan harapan bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak sehingga kariernya menjadi lebih baik dan masalah atas ekonomi bisa terjawab di kemudian hari karena pendidikan dan kariernya yang tinggi.

Perempuan memiliki beban kerja produksi dan kerja keperawatan sekaligus. Inilah yang menjadi alasan perempuan melakukan *waithood* (Kara & Mullings 2023). Kebutuhan ekonomi yang tinggi, seperti rumah, biaya sekolah anak, dan sebagainya dari tahun ke

tahun juga mengalami kenaikan. Artinya, pemuda membutuhkan ekonomi yang stabil untuk kehidupan ke depannya. Namun, sulitnya lapangan pekerjaan yang layak juga menjadi ancaman sehingga harus berfokus dan meningkatkan status pendidikan dan karier agar dapat hidup dengan ekonomi layak. Pada akhirnya, dengan kondisi yang berat inilah, membuat perempuan memilih pilihan hidup waithood.

Waithood sendiri adalah pilihan hidup yang bersifat individual. Salah satu hal yang dilakukan oleh kapitalisme dalam masyarakat di aspek kebudayaan penyelesaian masalah secara individual. Kapitalisme membuat narasi agar masalah-masalah yang terjadi atau dialami oleh masyarakat bisa diselesaikan oleh diri sendiri, salah satunya perempuan yang memilih waithood. Waithood sendiri juga sering diindikasikan dengan kebudayaan Barat. Barat sudah sangat lama dikenal dengan sistem kapitalismenya yang menekan segala pemecahan masalah pada individu dan hal ini membuat sistem kapitalisme lepas tanggung jawab. Waithood juga sebagai upaya para perempuan dalam mengatasi ketakutan dirinya pada kegagalan dalam berumah tangga. Kegagalan ini juga sering terjadi terutama di era late capitalism. Kapitalisme sudah ikut campur masuk ke dalam kebudayaan dan tingkah laku individu (Durham 2021) tanpa disadari. Dalam konteks ekonomi, biaya kehidupan tinggi dan sulitnya lapangan kerja juga tidak bisa dilepaskan dari sistem ekonomi saat ini. Kapitalisme akan membuat kesenjangan hidup di antara masyarakat karena distribusi alat produksi yang hanya dimiliki segelintir orang saja. Akibatnya, kekayaan hanya dimiliki oleh segelintir kelompok dan kondisi harga pasar serta lapangan kerja berada di tangan mereka. Hal ini menunjukkan waithood muncul karena adanya situasi kapitalisme yang sudah membuat perempuan khawatir atas hidupnya baik karena konteks sosial patriarki dan ekonomi serta sekaligus menciptakan pilihan hidup secara individual.

Pilihan waithood sendiri juga bukan tanpa konsekuensi bagi perempuan. Konteks patriarki yang masih sangat kuat, menggambarkan bahwa perempuan harus memiliki suami. Stigma negatif masih mengiringi perempuan yang tidak menikah seperti "perawan tua" (Mustikasari 2018). Usaha perempuan dalam melakukan waithood pun justru menimbulkan pengembangan makna kekerasan gender yang belum berhenti (Musahwi et al. 2022). Jadi, dalam memutuskan untuk menunda pernikahan pun, perempuan dalam posisi rentan mengalami

stigmatisasi dari masyarakat. Stigmatisasi merupakan kekerasan psikis terhadap perempuan yang dapat berdampak pada kekerasan lainnya.

Bagi negara, fenomena waithood ini juga bisa berdampak pada terjadinya resesi seks. Resesi seks akan membuat para tenaga kerja produktif di beberapa tahun mendatang mengalami beban yang lebih berat karena berkurangnnya tenaga kerja baru. Bagi kapitalisme, potensi berkurangnya tenaga kerja merupakan hambatan proses produksi. Kerja reproduksi harus tetap berlanjut agar produksi tenaga kerja produktif sebagai calon tenaga kerja terus berjalan. Karenanya, menurut negara, waithood juga menjadi fenomena yang perlu diseriusi. Maka, menikah ataupun tidak, pada akhirnya menjadi keputusan yang sebenarnya didorong oleh sistem kapitalisme secara tidak langsung. Dalam hal ini, waithood juga termasuk keputusan yang diciptakan diam-diam oleh sistem kapitalisme. Melalui beban kerja produksi dan perawatan tak berupah yang sering kali bebankan kepada perempuan serta kesulitan akses lapangan pekerjaan yang layak membuat perempuan memilih untuk menunggu untuk menikah dan memiliki anak. Waithood tidak hanya mencakup penundaan aspirasi pemuda dalam mengejar tujuan pendidikan dan karier, namun juga menggarisbawahi sifat gender dari ekspektasi keluarga dan masyarakat (Inhorn & Smith-Hefner 2021). Aspek waithood ini mencerminkan kesenjangan gender karena perempuan sering kali mengalami beban ganda. Konsep waithood bukan sekadar penundaan dalam mencapai tonggak masa dewasa tradisional namun juga sangat terkait dengan struktur ekspektasi gender dan pekerjaan perawatan tidak berupah yang menghadirkan tantangan dan implikasi sosial yang kompleks.

Penutup

Situasi kapitalisme patriarki menempatkan perempuan pada posisi rentan untuk melakukan kerja produksi dan kerja perawatan tak berupah sebagai kerja reproduksi sosial. Penindasan perempuan sangat berkaitan dengan ketimpangan kepemilikan modal baik dari keluarga dan juga sistem sosial yang menghasilkan diferensiasi kelas. Penindasan perempuan terjadi melalui perampasan tubuh yang secara biologis dapat melahirkan anak dan memproduksi tenaga kerja. Hal ini membuat perempuan menjadi subjek menciptakan, mengasuh, dan merawat anak untuk menjadi tenaga kerja bagi kapitalisme.

Kerja-kerja perawatan tidak dianggap oleh

kapitalisme karena tidak menghasilkan komoditasnya. Pada akhirnya, perempuan walaupun membantu kapitalisme dalam menjaga dan merawat tenaga kerja, mereka tidak pernah dianggap dan tidak mendapatkan upah. Dengan tidak memiliki akses modal berupa upah ini, akhirnya akan membuat perempuan bergantung kepada suaminya dan membuat perempuan tidak bisa bebas dari dominasi suaminya.

Dampak pengabaian kerja perawatan dan berupah namun dibebankan pada perempuan memunculkan waithood yang fenomena menjadi penundaan pernikahan dengan alasan ekonomi. Perempuan Indonesia berfokus pada karier dan pendidikan untuk mendapatkan kehidupan ekonomi yang lebih baik. Waithood muncul karena adanya opresi kapitalisme yang membuat perempuan menjalani pilihan hidup tersebut. Didukung oleh kondisi kerja produksi yang bias gender, kerja perawatan tak berupah yang identik dengan perempuan, serta realitas sosial yang membutuhkan biaya hidup tinggi dan sulitnya lapangan pekerjaan. Situasi ini mengalienasi perempuan dari kerja produksi—akibat tuntutan pada kerja perawatan tak berupah.

Perempuan perlu melakukan gerakan yang menuntut pengakuan atas kerja perawatan. Tuntutan ini sejalan dengan kerangka kerja 5R ILO yang memberikan pengakuan hingga jaminan menyeluruh bagi penyelenggaraan kerja perawatan, terutama penghargaan bagi perempuan yang telah melakukan kerja perawatan. Ini termasuk kesadaran pembagian kerja rumah sebagai pendukung kerja produksi—tidak lagi dibebankan hanya pada perempuan. Dengan demikian, maka kemunculan waithood sebagai alasan ekonomi dapat direduksi. Perempuan dapat menjadi tenaga kerja perawatan untuk keluarganya dan tetap diupah dan diberikan jaminan kesehatan dan perlindungan oleh negara ataupun kapitalis.

Daftar Pustaka

Andita, L. 2017. "Generasi Milenial Cenderung Menunda Pernikahan", *femina.co.id*, diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 22.03 WIB, di https://www.femina.co.id/sex-relationship/generasi-millennial-cenderung-menunda-pernikahan.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2022. "Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Jenis Kelamin (Persen), 2020--2022", diakses pada 15 November 2023, di https://pagaralamkota.bps.go.id/indicator/6/384/1/tingkat-partisipasi-angkatan-kerja-menurut-jenis-kelamin.html.

Badan Pusat Statistik (BPS). 2023. "Jumlah Penduduk Berumur 10 Tahun ke Atas menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin, dan Status Perkawinan, INDONESIA, 2022", diakses pada 17 November 2023, di

https://sensus.bps.go.id/topik/tabular/sp2022/193/0/0.

Bhattacharya, T., Fraser, N., Mohandesi, S., & Teitelman, E. 2017. *Social Reproduction Theory, Remaping Class, Recentering Oppression*. Pluto Press: London

Charmes, J. 2022. "Variety and Change of Patterns in the Gender Balance between Unpaid Care-Work, Paid Work and Free Time across the World and over Time: A Measure of Wellbeing?" Wellbeing, Space and Society, Vol. 3(February). DOI: 10.1016/j.wss.2022.100081.

Cameron, P. 2014. Relationship Problems and Money: Women Talk about Financial Abuse. WIREWomen's Information: West Melbourne.

Chisholm, J. F. 1999. "The Sandwich Generation", *Journal of Social Distress and the Homeless*, Vol. 8(3), hlm. 177--191. https://doi.org/10.1023/A:1021368826791.

Duffy, M., Albelda, R., & Hammonds, C. 2013. "Counting Care Work: The Empirical and Policy Applications of Care Theory", *Social Problems*, Vol. 60(2), hlm. 145–67. DOI: 10.1525/sp.2013.11051.

Day, C. & Evans, R. 2015. "Caring Responsibilities, Change and Transitions in Young People's Family Lives in Zambia", *Journal of Comparative Family Studies*, Vol. 46(1), hlm. 137–52, diakses pada 17 November 2023, di https://www.jstor.org/stable/43613105.

Durham, D. 2021. "Adulting and Waiting: Doing, Feeling and Being in Late Capitalism", *Sosyoloji Dergisi*, Issue 41-42, hlm. 1--23, diakses pada 17 November, di https://dergipark.org.tr/en/pub/sosder/issue/65879/1028091.

Elson, D. 2017. "Recognize, Reduce, and Redistribute Unpaid Care Work: How to Close the Gender Gap", *New Labor Forum,* Vol. 26(2), hlm. 52–61. DOI: 10.1177/1095796017700135.

Engels, F. & Untermann, E. 2021. "The Origin of The Family, Private Property and The State", *Politics and Kinship: A Reader*, Vol. 217(23). DOI: 10.4324/9781003003595-17.

Federici, S. 2009. *Caliban and The Witch; Women, The Body and Primitive Accumulation*. Third edit. Autonomedia: New York.

Federici, S. 2020. Beyond the Periphery of the Skin: Rethinking, Remaking, and Reclaiming the Body in Contemporary Capitalism. PM press: New York.

Felt, L. F. & Sinclair. P. R. 1992. "Everyone Does It': Unpaid Work in a Rural Peripheral Region", *Work, Employment & Society,* Vol. 6(1), hlm. 43–64. https://doi.org/10.1177/095001709261003.

Ferguson, S. 2020. *Women and Work; Feminism, Labour, and Social Reproduction*. edited by F. Publication. Pluto Press: New York.

Fernandes, M., Lupo, L., Benya, A., Dedeoğlu, S., Mezzadri, A., & Prügl, E. 2023. "Social Reproduction, Women's Labour and Systems of Life: A Conversation", *Dialogues in Human Geography*. doi: 10.1177/20438206231177072.

Hasan, A. M. 2019. "Waithood' & Mengapa Jomblo Usia 30-an Kini Jadi Fenomena Global", diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 21.30 WIB, di https://tirto.id/waithood-mengapa-jomblo-usia-30-an-kini-jadi-fenomena-global-dd5V.

Hitchings, E. & Douglas, G. 2023. "Many Divorcees end up with nothing or only Debt after Divorce – New Study", *The Conversation*, diakses pada 22 November 2023 pukul 07.56 WIB, di https://theconversation.com/many-divorcees-end-up-with-nothing-or-

only-debt-after-divorce-new-study-216665.

Inhorn, M. C. & Smith-Hefner, N. C. 2021. *Waithood; Gender, Education, and Global Delay in Marriage and Childbearing*. Berghahn: New York.

International Labour Organization (ILO). 2019. Care Work and Care Jobs for The Future of Decent Work. ILO: Geneva.

International Labour Organization (ILO). 2022. "Pernyataan Sikap Hari Perempuan Internasional 2022 - Industri Garmen Indonesia Perangi Ketidaksetaraan Gender dan Berdayakan Pekerja Perempuan", diakses pada tanggal 30 Oktober 2023 pukul 16.25 WIB, di https://www.ilo.org/jakarta/info/public/pr/WCMS_839061/lang--en/index.htm.

Irawaty, D. 2017. "Pekerja Rumah Tangga di Antara Paradoks Politik Gender dan Politik Developmentalisme: Studi Kasus dari Indonesia Era Orde Baru", *Jurnal Perempuan*, Vol. 22(3), hlm. 4–5. DOI: https://doi.org/10.34309/jp.v22i3.193.

Jakimow, T., Dewi, K. H., & Siahaan, A. Y. 2019. "The Ethics of Social Care in Indonesia: Women's Perspectives on Care in Politics, Development and Policy", *Asian Studies Review*, Vol. 43(2), hlm. 276. DOI: 10.1080/10357823.2019.1586830.

Kara, H. & Mullings, B. 2023. "Navigating Wait Space in Uncertain Times: Young Women and Precarious Labour in Turkey", *Antipode*, Vol. 55(4), hlm. 1047--1067. https://doi.org/10.1111/anti.12880.

Larastiti, C. 2020. "Sagu dan Krisis Reproduksi Sosial Orang Kaiso", *Jurnal Wacana Transformasi Sosial*, Vol. 38.

Lightman, N. & Kevins, A. 2021. "'Women's Work': Welfare State Spending and the Gendered and Classed Dimensions of Unpaid Care", *Gender and Society*, Vol. 35(5), hlm. 778–805. DOI: 10.1177/08912432211038695.

Lisnasari, A. 2023. "Pendidikan bagi Perempuan di Pedesaan masih sangat Rendah dan Timpang - Bagaimana Solusinya?", the Conversation, diakses pada 22 November 2023 pukul 09.36 WIB, di https://theconversation.com/pendidikan-bagi-perempuan-di-pedesaan-masih-sangat-rendah-dan-timpang-bagaimana-solusinya-202747.

Marx, K. 2006. Kapital Vol. 1. Hasta Mitra: Bogor.

Mailoa, M. 2022. "Realita Cuti Melahirkan Ibu Pekerja", *news.detik.com*, diakses pada 30 Oktober 2023 pukul 13.23 WIB, di https://news.detik.com/x/detail/intermeso/20220626/Realita-Cuti-Melahirkan-Ibu-Pekerja/.

Munsch, C. L. 2015. "Her Support, His Support: Money, Masculinity, and Marital Infidelity", *American Sociological Review*, Vol 80(3). DOI: 10.1177/0003122415579989.

Mustikasari, W. 2018. *Menunda Pernikahan, sebuah Pilihan Hidup Perempuan Masa Kini*. Universitas Gajah Mada: Yogyakarta.

Musahwi, M., Anika, M. Z., & Pitriyani, P. 2022. "Fenomena Resesi

Seks di Indonesia (Studi Gender Tren 'Waithood' pada Perempuan Milenial)", *Equalita: Jurnal Studi Gender dan Anak*, Vol. 4(2), hlm. 204-220. DOI: 10.24235/equalita.v4i2.12905.

Polivka, L. J. 2017. "Women and the Crisis of Care in the United States", *Generations*, Vol. 41(4), hlm. 29–35, diakses pada 17 November 2023, di https://claudepeppercenter.fsu.edu/womenand-the-crisis-of-care-in-the-united-states/.

Rahayu, R. I. 2017. "Di Mana Situs Penindasan Perempuan dalam Kapitalisme? Eksplorasi Marxisme dalam Reproduksi Tenaga Kerja", *Indoprogress*, diakses pada 15 November 2023, di https://indoprogress.com/2017/03/dimana-situs-penindasan-perempuan-dalam-kapitalisme-eksplorasi-marxisme-dalam-reproduksi-tenaga-kerja/.

Ramadhan, A. 2022. "Banyak Pemuda Menunda Nikah, Kenapa Sih?", *kumparan.com*, diakses pada 22 November 2023 pukul 09.26 WIB, di https://kumparan.com/kumparannews/banyak-pemuda-menunda-nikah-kenapa-sih-1zWqux1b13r/full.

Rifyana, E. P. 2019. "The Vulnerability of Occupational Health of Women Home Workers: A Study in Labor-Intensive Industries in Penjaringan, North Jakarta", *Jurnal Perempuan*, Vol. 24(3), hlm. 177--192, diakses pada 15 Novermber 2023, di https://indonesianfeministjournal.org/index.php/IFJ/article/view/347/317.

Sinambela, N. M. 2023. "Upah Pekerja Rumah Tangga di RI Minim, Hanya Sekitar Rp 800 ribu - Rp 1,5 Juta", *kumparan.com*, diakses pada 15 November 2023, di https://kumparan.com/kumparanbisnis/upah-pekerja-rumah-tangga-di-ri-minim-hanya-sekitar-rp-800-ribu-rp-1-5-juta-1zh0RVDVVuM.

Singerman, D. 2007. "The Economic Imperatives of Marriage: Emerging Practices and Identities among Youth in the Middle East", *Middle East Youth Initiative Working Paper*, No. 6. http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.1087433.

Thieme, T. A. 2018. "The Hustle Economy: Informality, Uncertainty and the Geographies of Getting By", *Progress in Human Geography*, Vol. 42(4), hlm. 529–48. DOI: 10.1177/0309132517690039.

Tjandraningsih, I. 2018. "Working, Housekeeping and Organizing: The Patriarchal System in Three Women's Living Spaces", *Jurnal Perempuan*, Vol. 23(4), hlm. 227. DOI: 10.34309/jp.v23i4.273.

Utomo, A. J. 2018. "Revisiting the Trends of Female Labour Force Participation in Indonesia", *Jurnal Perempuan*, Vol. 23(4), hlm. 249. DOI: https://doi.org/10.34309/jp.v23i4.274.

Wulandari, R. 2023. "Waithood: Tren Penundaan Pernikahan pada Perempuan di Sulawesi Selatan", *Emik*, Vol. 6(1), hlm. 52--67. https://doi.org/10.46918/emik.v6i1.1712.

Zilanawala, A. 2016. "Women's Time Poverty and Family Structure: Differences by Parenthood and Employment", *Journal of Family Issues*, Vol. 37(3), hlm. 369. DOI: 10.1177/0192513X14542432.